BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemungutan Pajak Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber dana pembangunan yang perlu dipacu secara terus menerus melalui penggarapan sumber-sumber baru dan peningkatan pengelolaan dari pajak yang sudah ada. Pemungutan pajak daerah membawa konsekuensi bagi Pemerintah Daerah untuk secara terus menerus mendorong pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kejujuran, dedikasi dan profesionalitas ikut berperan penting dalam meningkatkan motivasi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.¹

Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*) yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Hal ini sebagai konsekuensi dari ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa, melainkan pada hukum. Jadi, kekuasaan yang ada dalam negara dan kekuasaan itu harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hakikatnya adalah segala tindakan atau

¹ Jafar Nurdin Siradjah, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD Samsat Wilayah Maros*, Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014, hal. 1 .

perbuatan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk merealisasikan keperluan atau kepentingan negara maupun untuk warganya dalam bernegara. Keperluan atau kepentingan negara terhadap pajak tidak dapat dilakukan oleh negara sebelum ada hukum yang mengaturnya. Pengenaan pajak oleh negara kepada warganya (wajib pajak) harus berdasarkan pada hukum (undang-undang) yang berlaku sehingga negara tidak di kategorikan sebagai negara kekuasaan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang besar sehingga digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Menurut Rochmat Soemitro pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrak-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak jika dilihat dari wewenang pemungutannya dibedakan menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah.²

Pajak pusat (pajak negara) adalah setiap pungutan yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, kepada pemerintah pusat . Dapat diartikan bahwa pajak pusat ini diatur oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dan hasilnya digunakan untuk kepentingan Negara. Sedangkan pajak daerah adalah

² Adrian Sutedi, 2016, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak Daerah diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi Daerah .

Pemungutan Pajak Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber dana pembangunan perlu dipacu secara terus menerus melalui penggarapan sumber-sumber baru dan peningkatan pengelolaan dari pajak yang sudah ada. Pemungutan pajak daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk secara terus menerus mendorong pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kejujuran, dedikasi dan profesionalitas ikut berperan penting dalam meningkatkan motivasi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

Pajak daerah yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang memiliki sifat memaksa karena memuat sanksi hukum berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sekalipun pajak bersifat memaksa, pejabat pajak tidak boleh menyalahgunakan pajak yang dibayar oleh wajib pajak. Pajak yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang pajak tidak boleh melepaskan kedua fungsi yang dimilikinya, yakni fungsi anggaran maupun fungsi mengatur. Fungsi anggaran dan fungsi mengatur mutlak keberadaannya dalam undang-undang pajak termasuk dalam pelaksanaannya. Seyogianya, kedua fungsi tersebut terlaksana secara

bersamaan sehingga terdapat perpaduan yang harmonis. Namun meskipun fungsi anggaran dan fungsi mengatur harus berdampingan secara harmonis, tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tidak boleh diabaikan.

Pajak Kendaraan bermotor atau yang disingkat PKB merupakan jenis pajak daerah yang dipungut oleh provinsi namun setiap kabupaten diberikan kewenangan untuk memungut pajak itu sendiri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor disetiap kabupaten yang ada di provinsi. Kabupaten Sanggau yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang diberi kewenangan untuk memungut Pajak Kendaraan bermotor sendiri.

Pemerintah Kalimantan Barat juga telah mengatur mengenai hal ini melalui pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Kabupaten Sanggau merupakan daerah yang tingkat perekonomiannya sedang naik, seiring dengan hal itu laju pertumbuhan kendaraan bermotor di Kabupaten Sanggau hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun sebaliknya masih sangat banyak wajib pajak khususnya wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan data dari UPT PPD Kabupaten Sanggau sesuai dengan perhitungan waktu tahun yang berjalan dari 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2022 jumlah tunggakan pajak kendaraan

bermotor jenis roda 2 berjumlah Rp. 23,230,075,500 , roda 4 berjumlah Rp. 9,748,289,100 , dan roda 6 berjumlah Rp. 9,414,643,200.

Hal ini tentunya harus menjadi perhatian dari pemerintah daerah mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpengaruh pada pembangunan di Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Sanggau itu sendiri.

Oleh karena itu peneliti bermaksud untuk meneliti bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPT PPD wilayah Kabupaten Sanggau yang kemudian dituangkan dalam sebuah penulisan skripsi yang berjudul **“MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA UPT PPD KABUPATEN SANGGAU”**

B. Rumusan Masalah

Apakah pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPT PPD Kabupaten Sanggau sudah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPT PPD Kabupaten Sanggau
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPT PPD Kabupaten Sanggau

3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan UPT PPD Kabupaten Sanggau dalam mengatasi penunggakan pajak kendaraan bermotor

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu manfaat dari segi teoritis dan manfaat dari segi praktis :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dari sektor pemungutan pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku serta dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam kebijakan atau program-program yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemungutan pajak daerah dan memberikan informasi yang jelas mengenai pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambatnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, masukan dan sumbangan pemikiran untuk pengembangan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor serta sebagai bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi para penegak hukum pada khususnya untuk mengambil langkah-

langkah dalam upaya peningkatan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan pembahasan, dalam kerangka pemikiran skripsi ini penulis membagi dua bagian untuk menjelaskan secara terperinci sebagai berikut :

1. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Pajak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemahaman lainnya Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum).³

Pajak dari perspektif ekonomi bisa dinilai dari beralihnya sumber daya dari sektor privat (warga negara) kepada sektor publik (masyarakat). Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya

³ Stephana Dyah Ayu R, Rini Hastuti, "Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Dimaterial pada *tax Evasion* Wajib Pajak dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketetapan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, Dan Kecenderungan Personal. (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi)", *Kajian Akuntansi*, Volume 1, Nomor 1, Februari 2009, ISSN : 1979-4886, hlm.1 .

pajak menyebabkan dua situasi mejadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan kebutuhan masyarakat.⁴

Pajak dari perspektif hukum terjadi akibat adanya suatu ikatan yang timbul karena undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu kepada negara. Dimana negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan pajak tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.⁵

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sector swasta ke sector pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri ang terdapat pada pengertian pajak anatara lain sebagai berikut:⁶

1. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungut pajak megisyaratkan adanya alih dana sumber daya) dari sektor swasta (wajib membayar pajak) ke sektor Negara (pemungut pajak/administrator pajak).

⁴ Thomas Sumarsan, 2013, Perpajakan Indonesia, PT Indeks, Jakarta, hlm. 4

⁵ Cermati.com, 2022, "Pengertian Pajak, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya", diakses melalui <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya> , diakses pada tanggal 18 Agustus 2022.

⁶ Thomas Sumarsan, *Op.cit.* hlm 4-5

3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjuk adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.
5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/ Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan social (fungsi mengatur/regulatif).

b. Pajak Daerah

Menurut Dictionary of law, Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk mebiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.⁷

Ada juga dapat diuraikan dalam pengertian yang hampir senada yaitu pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak

⁷ M. Marwan & Jimmy P, 2009, Dictionary of Law Complate Edition, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 475

yang ditetapkan oleh daerah untuk kepeningan pembiayaan runah tangga pemerintah daerah tersebut.⁸

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2009 jenis pajak provinsi terdiri atas :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dan
5. Pajak Rokok.

Dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

⁸ Mardiasmo, 1991, *Perpajakan*, Edisi 3, Andi Offset, Yogyakarta, hlm 51. Lihat juga Soetrisno, PH, 1999, *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 18

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.⁹

c. Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralawan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan, termasuk alat-alat berat, dan alat-alat berat bergerak.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak. Pemahaman lainnya Pajak Kendaraan Bermotor¹⁰

Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan/atau menguasai adalah sebagai berikut.

1. Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor
2. Subjek pajak memiliki dan menguasau kendaran bermotor; atau

⁹ Pasal 2 ayat (1) UU No.8 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

¹⁰ Pasal 4 ayat (1) UU No.8 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3. Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor.¹¹

d. Efektivitas Hukum

Menurut Samodra Wijaya bahwa efektivitas itu paling baik dapat dimengerti jika dilihat dari sudut pandang sejauh mana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya alam dalam usahanya mengejar tujuan organisasi.¹²

Achmad Ali berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Kemudian ia juga mengemukakan bahwa umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi dari penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebani kepada mereka maupun dalam menjalankan hukum positif.¹³

Kemudian Soerjono Soekanto juga menerangkan mengenai 5 hal yang mempengaruhi efektivitas, di antaranya:

1. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri

Tidak cocoknya peraturan dalam perundang-undangan mengenai bidang kehidupan, membuat adanya benturan antara perundang-undangan itu sendiri dengan hukum yang tidak tertulis atau hukum

¹¹ Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*, Jakarta: Gramedia, 2010, hlm. 93.

¹² Samodra Wijaya, 1992, *Beberapa Konsep Untuk Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 29 .

¹³ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Vol 1, Kencana, Jakarta, hlm. 375.

kebiasaan, sehingga terjadi ketidak harmonisan dan ketidak serasian antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis.

2. Faktor penegakan hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Mental petugas yang menegakkan hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas permasyarakatan dan dst. Jika hukum nya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap , maka bias menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Jika hukumnya baik dan mentalitas orang yang bertugas menegakan hukum juga baik namun fasilitasnya kurang memadai, maka hukum tidak bias saja berjalan tidak sesuai dengan rencana.

4. Faktor masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan faktor masyarakat disini adalah, bagaimana kesadaran masyarakat akan hukum yang ada.

5. Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang

ada bisa masuk kedalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada, sehingga semuanya berjalan dengan baik.¹⁴

Sedangkan menurut Bustanul Arifin, efektifnya sebuah hukum didukung oleh 3 pilar yaitu :

1. Lembaga penegak hukum yang berwibawa dan dapat diandalkan ;
2. Peraturan hukum yang jelas dan sistematis
3. Kesadaran hukum masyarakat tinggi¹⁵

e. Pengertian UPT PPD

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPT PPD) merupakan salah satu pelaksana teknis dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Surat Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menkeu dan Mendagri No. Kep/13/XII/1976, Kep1169/MK/IV/76, No.311 Tahun 1976 tentang penyederhanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang berkaitan dengan pelayanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dalam suatu kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Dengan diterbitkan Surat Keputusan bersama ini diharapkan dapat menciptakan keseragaman dalam pengurusan STNK diseluruh wilayah Daerah Tingkat I.

¹⁴ Soejono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8 (Richard M Steers, 1995) (Chandra Oktiawan, 2017) (Sarwoto, 1990) (Pengertian Pajak dan Jenis-Jenisnya, 2022)

¹⁵ Zaenudi Ali, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, hlm. 62

Tujuan dari penyatuan ini adalah memudahkan pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor serta meningkatkan Pelayanan kepada para pemilikkendaraan bermotor. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Negara dan Daerah serta menertibkan data kendaraan. Selain dari pelaksanaan tugas pokoknya, SAMSAT juga melayani pemungutan Pajak Daerah, seperti melayani pemungutan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain yang sah, serta Pemberdayaan Aset Daerah Provinsi.

2. Kerangka Konsep

Menurt Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan/penguasaan kendaraan bermotor dan dipungut di wilayah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Pajak kendaraan bermotor dikenakan 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Menurut Mahmudi, efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sarana yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Dengan menganalisis efektivitas ini, maka akan terlihat perbedaan antara penerimaan pajak kendaraan bermotor yang telah berjalan dengan potensi yang sesungguhnya bisa diperoleh pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Wajib pajak terdaftar merupakan masyarakat yang mendaftarkan kendaraan pribadinya di Kantor Samsat dan inibisa dilakukan setiap pertama kali membeli kendaraan dan membuat STNK secara langsung masyarakat tersebut sudah terdaftar memiliki kendaraan.

Dalam pelaksanaannya terkait penarikan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sanggau masih belum maksimal atau belum sepenuhnya efektif, hal tersebut diduga karena kurangnya kesadaran hukum dari wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan adanya tunggakan pajak.

Banyaknya penunggakan pajak berarti menunjukkan belum efektifnya hukum atau peraturan yang telah berlaku. Pendapat suwanto mengistilahkan efektifitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian suatu tujuan.¹⁶

Dalam Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa: “Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Dalam hal ini, seharusnya peran instansi pemerintah yang terkait serta peran masyarakat khususnya wajib pajak disini yang

¹⁶ Sarwoto, 1990, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 126 .

dibutuhkan untuk terselenggaranya pemungutan pajak yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ada. Instansi pemerintah yang terkait dalam penyelenggaraan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat memberikan sosialisasi tentang pajak kendaraan bermotor serta mensosialisasikan Peraturan Daerah yang terkait mengenai pajak kendaraan bermotor dimana khusus untuk Provinsi Kalimantan Barat sendiri tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Serta mensosialisasikan bagaimana penyelenggaraan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang baik dan benar kepada wajib pajak, sehingga hal ini dapat memberikan pemahaman kepada wajib pajak sehingga menumbuhkan ketaatan dan kesadaran wajib pajak untuk mentaati setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, penelitian dikaji secara nyata sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Dalam konteks ini hukum tidak semata-mata dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, sebagai *ius constituendum* dan tidak pula semata-mata sebagai *ius constitutum*, akan tetapi secara empiris sebagai *ius operatum*.

2. Sifat Penelitian

Dalam penulisan penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian yang sifatnya deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dalam penelitian ini teori-teori, ketentuan peraturan, norma-norma, karya tulis yang dimuat baik dalam literature maupun jurnal, doktrin, serta laporan penelitian terdahulu sudah mulai ada dan bahkan jumlahnya cukup memadai, sehingga dalam penelitian ini hipotesis boleh ada atau boleh juga tidak.

3. Sumber Data/Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan oleh penulis ada 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer yang diperoleh penulis dari sumber objek penelitian penulis dengan cara menyebarkan kuisisioner dan wawancara secara langsung ke objek penelitian, dalam hal ini melakukan wawancara pada pihak atau pegawai UPT PPD Kabupaten Sanggau.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dalam bentuk laporan, serta melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang relevan serta literature lainnya. Data yang

digunakan yaitu laporan mengenai data tunggkalan dan penerimaan serta jumlah wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di UPT PPD Kabupaten Sanggau.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah ada data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder penulis menggunakan pengumpulan data yaitu :

a. Teknik Pengumpulan Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu ukum, baik dalam penelitian hukum normatif maupun dalam penelitian hukum empiris, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi (*documentation*) merupakan suatu pengumpulan data menggunakan dokumentasi dari UPT PPD Kabupaten Sanggau.

b. Teknik Wawancara

Dalam hal ini wawancara dilakukan oleh pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai pemungutan pajak kendaraan bermotor. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, dan

juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.¹⁷

c. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks.¹⁸ Dalam hal ini observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor UPT PPD Kab. Sanggau.

d. Teknik Penyebaran Angket/Kuisisioner

Teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan angket/kuisisioner dilakukan dalam penelitian yang sampelnya cukup besar, penelitian menyebarkan angket kepada responden yang telah ditentukan sesuai dengan teknik pengambilan sampling yang digunakan dalam penelitian tersebut.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian, menurut Ronny Hanitijo Soemitro : “Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti”.

Populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Unit Pelayanan Teknis Pengelola Pendapatan Daerah (UPT PPD) Wilayah Sanggau

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm. 64

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, Alabeta, Bandung, 2006, hlm. 203

2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sanggau

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti yang dianggap mewakili populasi, penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik sampel yang dilakukan berdasarkan tujuan tertentu. Sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya.

Berdasarkan uraian diatas dan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, maka jumlah sampel yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala UPT PPD Wilayah Sanggau
- 2) Kepala Bidang Tata Usaha UPT PPD Wilayah Sanggau.
- 3) Bagian Pengelolaan Data UPT PPD Wilayah Sanggau.
- 4) 50 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sanggau.

6. Teknik Analisis Data

Adapun model analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis yang diterapkan dalam suatu penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif. Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah data yang tidak diolah menjadi angka-angka, data sukar diukur dengan angka, bersifat monografis atau berwujud kasus-

kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi, hubungan antara variable tidak jelas, sampel lebih bersifat non probolitas, dan pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi.